

# ENVIRONMENTAL PROBLEM REVISITED: POTENSI KESADARAN DAN TATA KELOLA SAMPAH PARIWISATA DI DESA BATUKARAS, KABUPATEN PANGANDARAN

Penti Aprianti<sup>1</sup>, Willfridus Demetrius Siga<sup>2\*</sup>, Joel Roberto Dos Santos<sup>3</sup>, Samuel Krisna Surya Hanggara<sup>4</sup>, Gabriel Marcelinus Natanael<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

\* Corresponding Author

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p><b>Keywords:</b> <i>Tata Kelola Sampah, Aktivitas Pariwisata, Antroposentris.</i></p> <p><b>Article history:</b> <i>Received : 2024-5-01</i> <i>Revised : 2024-10-03</i> <i>Accepted : 2024-10-04</i></p>	<p>Tata kelola sampah yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi pihak yang kesehariannya berkelindan dengan aktivitas pariwisata yang bercorak antroposentris. Padahal, dengan tata kelola yang baik, kebersihan dan keindahan objek-objek wisata dapat dijaga. Begitu juga bagi pihak yang kesiapannya kurang dalam mengelola, sampah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata antroposentris ini dapat menjadi persoalan. Dengan metode <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA), peneliti menganalisis bagaimana kesadaran dan tata kelola sampah yang diketahui oleh masyarakat Desa Batukaras yang telah berstatus Desa Wisata pada tahun 2022. Berdasarkan hasil triangulasi penelitian, Desa Batukaras telah siap dalam menerima wisatawan nusantara (wisnus) dan mancanegara (wisman), namun kurang siap dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata yang antroposentris.</p>
	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>Sustainable waste management is a challenge for parties whose daily activities are intertwined with anthropocentric tourism activities. Meanwhile, with good management, the cleanliness and beauty of tourist objects can be maintained. Likewise for those who are less prepared to manage, the waste generated from anthropocentric tourism activities can become a problem. Using the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, researchers analyzed how awareness and management of waste is acknowledged by the people of Batukaras Village, which has the status of a Tourism Village in 2022. Based on the results of research triangulation, Batukaras Village is ready to welcome domestic and foreign tourists, but is not ready to manage waste generated from anthropocentric tourism activities.</i></p>

## 1. PENDAHULUAN

Dari mulai Pantai Batukaras, Situ Cisamping, Situs Sembah Agungwisata sungai yang terhubung dengan Green Canyon, dan laguna, Desa Batukaras perlu mempersiapkan beberapa aspek agar menjadi Desa Wisata yang unggul. Aspek tersebut yaitu, berkenaan dengan 1) infrastruktur, 2) higienis, kebersihan, dan kesehatan, dan 3) kesiapan informasi teknologi (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2015). Selain itu, Desa Batukaras juga perlu memperhatikan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas (3A) sehingga menjadi Desa yang memiliki pariwisata yang berkelanjutan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021), yang berkaitan juga dengan domain ekonomi, lingkungan, dan sosial budayanya. Faktor-faktor kesiapan tersebut relevan dengan Visi Kabupaten Pangandaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021, yakni “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”.

Paradigma pembangunan berkelanjutan yang diimbau harus diaplikasikan di Desa Wisata bukanlah hal baru. Setidaknya sejak tahun 1980, konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan sendiri sudah muncul di acara *International Union for the Conservation of Nature*, melalui buku *Building a Sustainable Society* yang ditulis oleh pemerhati ekologi asal Amerika, Lester R. Brown, dan dipublikasikan satu tahun berikutnya (Brown, 1981). Bagi Brown, pembangunan berkelanjutan di sektor apapun perlu memperhatikan bagaimana kemungkinan terjadinya over eksploitasi yang dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhannya semata tanpa mempertimbangkan kelestariannya (Muthmainnah, 2008). Di buku *Membangun Desa* juga ditekankan bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dalam hal lingkungan harus menjamin tidak merugikan generasi mendatang, dan setiap pembangunan yang dilakukan harus mengoptimalkan lingkungan dan bukan bercorak eksploitatif (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021). Ketika pembangunan pariwisata dikembangkan dengan fondasi laku eksploitatif, tata kelola sampahnya juga akan menjadi masalah, lebih lagi ketika aktivitas tersebut berkarakteristik antroposentris (Muthmainnah, 2008). Jadinya, pembangunan pariwisata berkelanjutan yang digadang menjadi sumber pendapatan masyarakat sekitar, atau medium pembelajaran kearifan lokal bagi wisatawan, berkemungkinan menjadi perpanjangan tangan untuk perusakan lingkungan.

Pola pikir dan laku antroposentris sendiri telah menjadi motor dari modernitas. Sebagaimana kata W. W. Rostow, dalam buku *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* yang ditulis oleh Mansour Fakih (Fakih, 2002), modernitas akan menjadikan industri sebagai tulang punggung yang utama. Juga, dalam modernitas, tingkat konsumsi yang tinggi (*high mass consumption*) dijadikan sebagai penanda utama bahwa masyarakat dapat dikategorikan sebagai modern atau tidak (Muthmainnah, 2007). Ekses dari logika berpikir ini menyebabkan diinternalisasinya pemikiran yang bersifat *either-or* pada setiap pola pikir dan lakunya. Baik-buruk, miskin-kaya, kotor-bersih, lokal-pendatang, untung-rugi, aku-kamu, dan sebagainya. Seolah tidak ada ruang untuk proses belajar dan ruang *trial and error*. Contohnya, logika *not in my backyard* dalam pengelolaan sampah. Ketika logika itu digunakan, maka sampah yang tidak berada di ‘*my backyard*’ itu seolah bukan tanggung

jawab dirinya/bersama (Muthmainnah, 2008).

Lebih lanjut, corak antroposentrisme dalam kaitannya dengan modernitas akan membahayakan sektor pariwisata. Para pelaku pariwisata bisa saja memanfaatkan objek wisata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Pada aspek lain seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan, sosial, dan budaya juga berpeluang untuk diabaikan. Menurut laporan Tourism Concern tahun 2009, "*Putting Tourism to Rights*", relokasi paksa, akuisisi lahan ilegal, polusi yang menyebabkan kesehatan memburuk, hilangnya mata pencaharian, upah dan kondisi kerja yang buruk, bahkan eksploitasi anak dan seksual dapat menjadi dampak buruk dari industrialisasi pariwisata yang bercorak antroposentris (Kurniawan & Primawardani, 2021). Aspek yang paling terabaikan dari industrialisasi pariwisata yaitu persoalan sampah, disebabkan persepsi bahwa sampah itu kotor, berbau, jorok, becek, dan sumber penyakit (Muthmainnah, 2007). Terdapat perspektif juga pihak yang mengurus sampah seolah menjadi bagian dari kelas bawah. Implikasinya, tata kelola sampah dalam pariwisata menjadi tidak optimal.

Di Desa Batukaras, persoalan tata kelola sampah telah diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Pasal 2 PERDA, pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran, termasuk Desa Batukaras, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Badan. Meskipun sudah ada peraturan tertulis dan mengikat, persoalan sampah di Desa Batukaras dalam kaitannya dengan aktivitas pariwisata belum dikelola dengan baik. Secara infrastruktur, kontainer sampah hanya ada 1 buah, lokasinya pun tidak ideal karena berada di jalan utama. Lalu, tempat sampah yang berada di objek wisata Legok Pari jumlahnya terbatas. Adapun timbulan sampah tidak diperhatikan dan dibiarkan hingga menumpuk dan kumuh. Pada tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran juga telah menyoroiti persoalan yang sama. Menurut Anggota Komisi II DPRD Pangandaran saat itu, Pak Ucup Supriatna, pengelolaan sampah di Batukaras belum optimal karena terbatasnya petugas pemungut dan pengangkut sampah, serta tidak adanya lahan untuk tempat pembuangan sampah (Madlani, 2016). Pengelolaan sampah di Desa Batukaras yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (LHK) juga disebut tidak mengimplementasikan PERDA No. 10 Tahun 2016 dengan baik (Nuryaman, 2019).

Berdasarkan latar belakang ini, muncul tiga pertanyaan penelitian terkait tata kelola sampah di Desa Batukaras: 1) Bagaimana Desa Batukaras mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata di daerahnya?, 2) Bagaimana kesadaran dan kesiapan masyarakat Desa Batukaras dalam menyikapi persoalan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata?, dan 3) Bagaimana menyikapi persoalan sampah dari aktivitas pariwisata yang bercorak pikir dan laku antroposentris?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tata kelola sampah di Desa Batukaras yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata, mengetahui kesadaran dan kesiapan masyarakat Desa Batukaras dalam menyikapi persoalan sampah, dan mengetahui implikasi dari aktivitas pariwisata di Desa Batukaras yang bercorak antroposentris dan kemungkinan tawaran corak ekosentris terhadapnya.

## 2. METODOLOGI

Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA adalah metode penelitian yang pendekatannya berjangkar pada proses belajar bersama antara peneliti, masyarakat lokal, dan pihak/praktisi terkait dalam rangka merencanakan bersama pembangunan masyarakat sesuai kebutuhan dan aspirasinya. Metode PRA menjadi metode yang relevan digunakan dalam meneliti pihak/komunitas yang termarginalisasi dan rentan, sekaligus membantu peneliti dalam memahami kebutuhan subjek penelitian yang beragam (Dummett et. al., 2013). Dengan PRA, subjek penelitian berperan sebagai pelaku utama secara partisipatif dalam membantu peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan implementasi suatu program. Setiap pihak yang terlibat saling bertukar informasi, konsultasi, kolaborasi, dan pemberdayaan. Data primer diambil dengan metode triangulasi dalam bentuk wawancara individu, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD).

Dengan triangulasi ini, peneliti juga mendapat temuan terkait peta sumber daya manusia dan alam, juga terkait kecenderungan perilaku masyarakatnya. Pada penelitian ini, data tersebut berfungsi untuk mengetahui sampah yang dihasilkan dan tata kelolanya. Secara spesifik, wawancara individu dilakukan dengan 20 orang dan diskusi kelompok terarah dilakukan dengan 2 kelompok/lembaga. Observasi sendiri dilakukan sebanyak 15 kali dalam rentang jumlah 28 hari penelitian. Wawancara dilakukan setelah responden memberikan persetujuan diikutsertakan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diambil melalui berbagai sumber seperti buku, literatur, situs internet, dan jurnal ilmiah berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 28 hari sejak tanggal 14 Juli hingga 10 Agustus 2023.

## 3. RESULT

Desa Batukaras terletak di wilayah Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dengan luas wilayah sekitar 21 hektar dan total panjang garis pantai 600 M. Per tahun 2023, Desa Batukaras terdiri dari 6 Dusun dengan total 37 Rukun Tetangga (RT) dan 15 Rukun Warga (RW). Di sebelah utara, Desa Batukaras berbatasan dengan Desa Cijulang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Masawah. Sedangkan sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kertayasa. Adapun jarak dari Desa Batukaras ke Rumah Sakit terdekat, yaitu RSUD Pandega Pangandaran, sekitar 25 KM dengan estimasi waktu 30-45 menit apabila tidak macet. Meskipun begitu, terdapat Puskesmas Pembantu di Desa Batukaras, yang letaknya berada di Dusun Sanghyangkalang, dekat pesisir pantai.

Berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 Desa Batukaras, penduduk di Desa Batukaras berjumlah 5351 jiwa, dengan jumlah laki-laki 2673 jiwa dan perempuan 2678 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan rentang usianya yaitu, <1-4 tahun berjumlah 315 jiwa, 5-14 tahun berjumlah 826 jiwa, 15-39 berjumlah 1839 jiwa, 40-64 tahun berjumlah 1785 jiwa, dan >65 tahun berjumlah 382 jiwa. Penduduk Desa Batukaras mayoritas bekerja sebagai petani dengan total 997 jiwa dan nelayan 342 jiwa.

Dengan daya tarik hasil laut dan keindahan pantainya, Batukaras menjadi salah satu destinasi wisata pariwisata lokal maupun mancanegara. Hal ini menjadikan Batukaras memiliki pendapatan ekonomi yang potensial dari pariwisata tersebut. Sebab, aktivitas pariwisata identik dengan aktivitas ekonomi. Contohnya, transaksi ekonomi saat menggunakan transportasi dari suatu titik ke titik lain objek wisata, membayar jasa yang ditawarkan untuk eksplorasi pariwisata, dan juga jual-beli produk-produk yang dihasilkan dari wilayah pariwisata. Untuk mempromosikan potensi wisata dan nilai kearifan lokal bagi pendatang, terlihat beragam usaha oleh para pelaku pariwisata, seperti mengusahakan akses yang mudah dan menjamin kesediaan jasa dan produk yang berkualitas. Hal tersebut juga dikembangkan agar masyarakat lokal mendapatkan pendapatan. Potensi pendapatan

besar dan berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku usaha tapi juga pemerintah setempat, dan investor apabila ada.

Keterkaitan antara aktivitas pariwisata dengan aspek ekonomi di satu sisi memang menguntungkan karena menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Akan tetapi, di sisi yang lain, terdapat kemungkinan bahwa aspek ekonomi dimaknai secara sempit dan terlampaui transaksional. Pariwisata seolah hanya sekedar sumber pendapatan tanpa makna lanjutan. Alhasil, semua pihak yang terkait dengan pariwisata akan berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari aktivitas pariwisata dan berkemungkinan menganggap aspek di luar ekonomi sebagai objek yang dapat dieksploitasi. Corak antroposentris dalam kaitannya dengan ekonomi ini memiliki dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan dan juga pariwisata itu sendiri. Ketidakmampuan manusia mengendalikan sifatnya sebagai *homo economicus* ini akan menjadi sangat berbahaya karena menempatkan manusia dalam suatu situasi “berperang” dengan manusia lain seperti gambaran *homo homini lupus* (Maharani, 2016).

Dalam buku Pedoman Desa Wisata tertulis bahwa Pariwisata yang berkelanjutan memiliki dua aspek lain yang lain perlu diperhatikan, yakni aspek lingkungan dan aspek sosial budaya (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021:47). *Aspek lingkungan* dalam pariwisata perlu diperhatikan karena menekankan pentingnya optimalisasi lingkungan, bukan eksploitasi. Oleh karenanya, pembangunan pariwisata harus memperhatikan lingkungan dan kemampuan daya dukungnya. Tujuannya adalah menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan tanpa merugikan generasi yang akan datang. Selain itu, *aspek sosial budaya* juga perlu diperhatikan karena pariwisata akan selalu berkaitan dengan masyarakat lokal. Pariwisata dan pembangunan harus selalu melibatkan masyarakat lokal agar menciptakan keseimbangan antara masyarakat dengan wisatawan. Perpaduan antara ketiga aspek ini nantinya tidak hanya akan membuat pariwisata meningkatkan perekonomian, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat nilai budaya dan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata bukan sekedar menjadi aktivitas ekonomi belaka tapi juga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal.

Pariwisata di Desa Batukaras telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial budaya, membantu masyarakat setempat untuk mencapai kemandirian. Namun, masih terdapat kekurangan dalam upaya menjaga lingkungan sekitar dengan optimal. Ketidakseimbangan ini terutama terlihat dalam masalah pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh para wisatawan. Dampak negatif dari sampah yang dihasilkan oleh pariwisata belum dikelola secara efektif. Hal tersebut diakibatkan oleh ke bak sampah, lahan dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang kurang memadai untuk menampung dan mengelola sampah yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 orang masyarakat lokal, 8 orang perangkat desa, dan 7 orang yang tergabung dalam lembaga masyarakat (*red*) yang ada di Desa Batukaras menyinggung bahwa tata kelola sampah di Desa Batukaras belum mencapai standar yang memadai dari sisi fasilitas dan juga kesadarannya.

Dengan adanya PERDA Kabupaten Pangandaran Nomor 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, idealnya, masyarakat Desa Batukaras terikat secara hukum untuk menjalankan yang diimbau aturan tersebut. Selain itu, aturan tersebut juga berarti dapat menjadi acuan untuk pemberian sanksi bagi yang melanggar. PERDA yang telah ditetapkan ini menjadi payung hukum dalam mengatasi masalah sampah yang ada di Desa Batukaras (Pohan & Supriharjo, 2013).

Dari para partisipan penelitian yang peneliti wawancara, semuanya setuju bahwa sampah di Desa Batukaras menjadi permasalahan *lagu lama* yang selalu dibicarakan namun tidak kunjung diselesaikan. Konsolidasi dan sosialisasi mengenai tata kelola sampah dari mulai lingkup perumahan hingga sewilayah Desa telah dilakukan entah melalui LHK Kabupaten Pangandaran atau PKK Desa dan Dusun di Desa Batukaras. Dapat dikatakan bahwa upaya kolektif dilakukan namun belum terintegrasi menyeluruh. Upaya kolektif ini tercermin dari usaha penyediaan TPS

meskipun belum bertempat di wilayah yang ideal, adanya Bank Sampah, dan insenerator. Dari masyarakat atau komunitas seperti Karang Taruna dan BSC juga melakukan bersih-bersih sampah pantai setiap satu bulan sekali.

Dengan jumlah 6 Dusun dan total luas wilayah 21 hektar, Desa Batukaras memiliki 1 Bank Sampah yang didukung oleh BKKBN bernama Bank Sampah BENGRAS. Dari tahun 2020-2022, terdapat 57 nasabah yang aktif *menabung* sampahnya ke Bank Sampah BENGRAS setiap satu kali dalam seminggu di hari Jum'at. Biasanya dikumpulkan *ba'da* sholat Ashar atau dalam rentang waktu pukul 3 sampai 5 sore. Material sampah pun beragam dari mulai sampah kertas, botol plastik, hingga aluminium dan jaring ikan.

Per Agustus tahun 2023, terdapat 58 total nasabah yang *menabung* sampah di Bank Sampah BENGRAS. Berdasarkan data Bank Sampah BENGRAS (2020-2022) maka total sampah yang terkumpul di Bank Sampah BENGRAS dalam rentang waktu 2020-2022 di Desa Batu Karas adalah 5.033,8 Kg. Dapat dikatakan bahwa rata-rata per tahunnya, terdapat total 1.677,93 Kg sampah yang terkumpul di Bank Sampah BENGRAS. Artinya, Bank Sampah BENGRAS setiap bulannya menerima sebanyak kurang lebih 139 Kg sampah dari para nasabahnya. Selanjutnya, per Juni 2023, jumlah sampah yang diterima oleh Bank Sampah BENGRAS mengalami peningkatan. Selama enam bulan berjalan di tahun 2023 ini, Bank Sampah BENGRAS sudah menerima sampah dari para nasabahnya sebanyak 2.746,70 Kg. Bahkan, jumlah sampah secara *de facto* saja lebih besar dari yang tertera pada lampiran tersebut karena tabel sampah tersebut tidak mencerminkan sepenuhnya seluruh jenis sampah yang terdapat di Bank Sampah BENGRAS. Ada beberapa jenis sampah lainnya yang jumlahnya sangat kecil atau tidak memiliki nilai rupiah sehingga tidak dimasukkan dalam lampiran tersebut. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya upaya mandiri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batukaras dalam pengelolaan sampah rumah tangganya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuh masyarakat lokal, satu orang pengelola Bank Sampah BENGRAS, dan Kepala Dusun Sanghyangkalang, disebutkan bahwa terdapat masyarakat Desa Batukaras yang lebih memilih membakar sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangganya. Ada juga masyarakat yang memutuskan untuk langsung membuang sampah ke TPS yang tersedia. Artinya, data yang peneliti lampirkan tidak sepenuhnya menunjukkan kesadaran masyarakat Desa Batukaras terkait pentingnya tata kelola sampah.

Terlebih, perlu juga disoroti sampah organik yang dihasilkan dari sisa-sisa hasil alam yang terbuang atau tidak digunakan. Merujuk pada data hasil alam yang telah dibahas pada bab awal ini, maka sampah organik berpotensi menghasilkan jumlah sampah yang banyak. Sampah yang berasal dari sumber daya alam merupakan aspek kritis dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sumber daya alami yang menghasilkan limbah organik dan anorganik perlu dikelola dengan bijak. Maka diperlukan tindakan-tindakan seperti daur ulang, pemilahan, dan pengelolaan yang efisien. Namun pada kenyataannya terdapat ketidakseimbangan dalam infrastruktur pengelolaan sampah dengan hanya memiliki 1 TPS dan 1 insenerator yang tidak dapat beroperasi. Dengan keadaan itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam juga sangat diperlukan. Pemerintah dan masyarakat harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di luar Pantai Legok Pari karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hanya mengelola sampah yang berasal dari aktivitas pariwisata di Pantai Legok Pari.

Jumlah wisatawan lokal ini semakin meningkat ketika memasuki masa-masa liburan, seperti Idul Fitri dan tahun baru. Jumlah wisatawan lokal yang meningkat pada masa-masa liburan umumnya menghasilkan sampah dengan jumlah yang sangat banyak dibandingkan hari biasanya. Sayangnya, meskipun jumlah sampahnya meningkat, petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah tidak ikut bertambah. Hal ini membuat penumpukan sampah menjadi tidak terhindarkan. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Bank Sampah BENGRAS, kita

juga perlu melihat bahwa sampah yang menumpuk adalah sampah *kiriman* atau yang dibawa oleh wisatawan ketika berlibur di Batukaras. Lebih lagi, karena tata kelola sampah yang belum terstruktur memungkinkan sampah yang menumpuk terbuang atau dibuang sengaja ke sungai atau laut karena dianggap solusi instan. Hal serupa juga terjadi ketika ada perayaan-perayaan besar di Desa Batukaras, seperti Hajat Laut, Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Jadi Karang Taruna. Dalam perayaan-perayaan tersebut, produksi sampah akan jauh lebih banyak dari biasanya, tetapi petugas-petugas yang bertanggung jawab juga tidak mengalami penambahan personil. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa selama acara berlangsung, imbauan untuk mengatur sampah secara pribadi dan fasilitas untuk menampung sampah sangat minim.

Sedangkan di TPS Sanghyangkalang sendiri terdapat sebuah mesin pengolah sampah (insenerator). Mesin ini telah ada sejak beroperasinya TPS Dusun Sanghyangkalang, yakni sekitar tahun 2018-2019 an. Setiap harinya, para pekerja mengambil sampah-sampah yang dihasilkan oleh aktivitas pariwisata dan juga aktivitas rumah tangga. Setelah sampah-sampah tersebut terkumpul, sampah kemudian disetor ke TPS Sanghyangkalang untuk dikelola lebih lanjut. Sampah kemudian dipisah antara sampah basah dan sampah kering. Sampah-sampah basah dijadikan pupuk sedangkan sampah kering dimasukkan ke dalam insenerator. Catatan yang kiranya perlu diperhatikan di sini adalah sampah-sampah tersebut diambil dari pelaku pariwisata dan juga pihak rumah tangga yang terdaftar sebagai anggota.

Seiring berjalannya waktu, TPS Dusun Sanghyangkalang berikut dengan inseneratornya dinilai berhasil membantu mengatasi persoalan tata kelola sampah di desa Batukaras. Keberhasilan TPS dalam mengelola tata kelola sampah di Desa Batukaras terkur dari berkurangnya intensitas penumpukan sampah di desa ini. Para pekerja yang pada awalnya terdiri dari 5 orang pengambil sampah, rutin berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengambil sampah dan kemudian diolah ke TPS. Meski demikian, keberadaan TPS ini juga memiliki kekurangan. Bagi Pak Amung Suganda selaku Kepala Dusun Sanghyangkalang, keberadaan TPS ini belum mampu mengatasi keseluruhan tata kelola sampah di Desa Batukaras secara maksimal. Sampah-sampah yang telah dikumpulkan, diangkut, dan dikelola cenderung terbatas pada sampah yang berada di Dusun Batukaras, Dusun Sanghyangkalang, dan Dusun Nagrog saja sedangkan 3 dusun lainnya seperti Dusun Cidahu, Dusun Mandala, dan Dusun Pasuketan belum terkelola dengan baik. Ditambah lagi semenjak terdampak pandemi Covid-19 ada beberapa pekerja yang mesti diberhentikan guna menghemat pengeluaran. Peneliti juga mendapat informasi bahwa per bulan Juli-Agustus 2023, kondisi insenerator mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi dengan optimal. Meskipun begitu, TPS di Dusun Sanghyangkalang masih beroperasi hingga saat ini. Beroperasinya TPS Sanghyangkalang menjadi bukti betapa mendesak persoalan tata kelola sampah di desa Batukaras sehingga penggunaan TPS dusun Sanghyangkalang dinilai masih menjadi solusi jika atasi persoalan tata kelola sampah di desa tersebut.

Peneliti juga mengamati bahwa di wilayah tanggungjawab LHK, yaitu di wilayah Pantai Legok Pari, timbulan sampah banyak yang dibiarkan tidak dikelola oleh LHK terkait. Dengan total 11 buah tong sampah di area depan, 16 buah tong sampah di area parkir belakang, dan 25 buah tong sampah di area pesisir pantai, terdapat beberapa wilayah di mana sampah tetap tercecer dan tidak dikelola dengan baik dan berpotensi menjadi sumber penyakit.

Mengenai persoalan tata kelola sampah di Desa Batukaras, pihak pemerintah desa sebetulnya telah melakukan berbagai macam alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari mulai mendorong tersedianya lebih dari satu Bank Sampah, berusaha membuat TPA yang luas, hingga *beach cleaning* tiap satu bulan sekali. Selain pemerintah juga berusaha menanggulangi sampah seperti yang dilakukan oleh penduduk setempat termasuk komunitas/lembaga non pemerintah yang berada di Desa Batukaras. Salah satu alternatif yang telah diupayakan oleh pemerintah desa adalah dengan membuat TPS yang terletak di Dusun Sanghyangkalang. TPS Dusun Sanghyangkalang berbeda

dengan TPS Desa Batukaras yang berada di Legok Pari.

TPS Dusun Sanghyangkalang kabarnya hanya dapat digunakan bagi mereka yang telah terdaftar sebagai anggota dari TPS tersebut yang rutin membayar uang iuran yang dibebankan.

Apabila merujuk pada pedoman Desa Wisata, persoalan lingkungan termasuk tata kelola sampah seharusnya menjadi prioritas. Sebab, dengan status Desa Wisata dan potensi wisatawan yang datang, Desa Batukaras perlu mempersiapkan diri dalam hal tata kelola sampahnya. Apabila penumpukan sampah terjadi dan tidak segera ditanggulangi, pastinya akan menyebabkan lingkungan tidak sedap dan tidak enak dipandang. Maka diperlukan ketegasan dari pemerintah daerah dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan agar tidak terjadi penumpukan tersebut (Pohan & Suprihardjo, 2013). Pengelolaan sampah di Desa Batukaras juga haruslah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berpengaruh dan berkepentingan besar. Hal ini merupakan salah satu cara agar masyarakat ikut aktif dalam pengelolaan sampah. Tata kelola sampah bukanlah tugas satu pihak saja, maka pemerintah dan masyarakat Desa Batukaras tidak bisa menyerahkan persoalan sampah kepada petugas kebersihan yang ditunjuk oleh LHK Lingkungan. Tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan inovasi yang kreatif bersama pemangku kepentingan dalam mengelola sampah di Desa Batukaras. Hal ini tentunya akan meningkatkan minat pengunjung wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Desa Batukaras, dan bahkan lebih dari itu segala aspek kehidupan masyarakat lokal akan lebih terjamin dan mampu bersaing dengan Desa Wisata lain yang ada di Indonesia.

Persoalan pengelolaan sampah pada tingkat tertentu tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh keberadaan pola pikir yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya, baik disadari maupun tidak. Dalam konteks Desa Batukaras, masalah inti yang menghambat penyelesaian masalah pengelolaan sampah adalah pandangan antroposentris yang masih merajalela di kalangan masyarakat.

Antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta (Etika Lingkungan Hidup, A Sonny Keraf, hlm. 47). Implikasi dari corak pemikiran ini adalah kecenderungan manusia untuk melihat segala sesuatu yang berada di dunia ini bernilai sejauh berguna dan menunjang kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta cenderung menyalahgunakan hak dan kekuasaannya untuk memperdaya lingkungan hidup. Dalam hal ini manusia perlu meninjau kembali perilaku hidup yang seimbang tanpa mengesampingkan aspek lingkungan hidup. Dalam corak pikir ekonomi kapitalis yang berorientasi pada laba, yang terjadi hanyalah pengeksploitasian terhadap sumber kekayaan alam; paradigma ini menggali dan membongkar, tanpa memikirkan akibat bagi alam, ataupun meminimalkan resiko pencemaran (Suseno, 1991). Pengabaian terhadap isu kerusakan alam merupakan imbas utama dari corak ekonomi kapitalis yang cenderung menekan besarnya biaya produksi. Jika paradigma antroposentris ini terus dibiarkan, jelas alam lingkungan akan semakin rusak. Perlu adanya revitalisasi untuk menghidupkan kembali lingkungan yang tercemar.

Dalam era modern ini, banyak kegiatan pariwisata yang mengandalkan keindahan alam, namun perlu memperhatikan keseimbangan alam. Banyak kegiatan pariwisata yang kurang memperhatikan hal ini, sehingga mencapai titik kritis dalam kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan berlebihan, pencemaran sungai oleh limbah pabrik, dan penumpukan sampah akibat kurangnya pengelolaan yang baik. Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati akan berdampak negatif pada kehidupan manusia. Masalah penumpukan sampah ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi budaya yang perlu diubah. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memperhatikan batas kemampuan alam agar keseimbangan tetap terjaga.

Oleh karena itu, perlu untuk meninjau ulang pendekatan antroposentris saat menghadapi

masalah lingkungan. Meskipun manusia merupakan pusat dari alam semesta, namun dalam situasi ketika lingkungan mengalami ketidakseimbangan, penting bagi manusia untuk mengurangi pandangan antroposentris dan mengedepankan pendekatan ekosentris untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya membangun resiliensi masa depan antara manusia dan alam menjadi krusial dalam hal ini. Resiliensi ini diperlukan agar keberlangsungan kehidupan di masa depan, baik manusia maupun alam, dapat terjamin tanpa harus mengorbankan aspek-aspek yang esensial bagi keduanya.

Ide tentang ekosentrisme dapat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari laku antroposentris akan lingkungan. Ekosentrisme tidak hanya menaruh perhatian pada manusia, hewan, dan tumbuhan, melainkan juga menghargai keberadaan material lain, seperti air, tanah, udara, batu, dan lainnya, yang tanpa semuanya itu makhluk hidup tidak akan bisa eksis di alam raya ini (Arimbawa & Putra, 2021). Ide ini menempatkan manusia bukan pusat tapi sebagai bagian dari alam semesta dan keberadaannya di alam semesta sangat tergantung dengan makhluk dan material lainnya. Tanpa makhluk dan material lainnya, manusia tidak akan bisa eksis di tengah alam semesta ini. Menjadi jelas mengapa manusia perlu menghargai alam semesta, terlebih dalam aktivitas pariwisata. Alasannya adalah manusia bukanlah pusat dari alam semesta ini. Dalam hal ini, manusia bukanlah pusat dari aktivitas pariwisata. Manusia adalah bagian dari aktivitas pariwisata itu dan seharusnya manusia perlu menghargai semua unsur yang menjadi bagian dari aktivitas pariwisata. Sampah yang tercipta akibat aktivitas pariwisata dengan demikian sudah layak dan sepatutnya menjadi bagian yang tidak boleh terlupakan oleh manusia. Manusia harus mengusahakan agar sampah yang tercipta dalam aktivitas pariwisata tidak lagi menjadi musuh, melainkan menjadi potensi yang mampu mengembangkan aktivitas pariwisata menjadi lebih baik lagi. Manusia, sekali lagi, jangan menganggap dirinya sebagai pusat dari aktivitas pariwisata dan juga lingkungan, melainkan bagian dari aktivitas pariwisata serta lingkungan yang perlu untuk menghargai unsur-unsur lain yang berada di dalamnya.

#### 4. KESIMPULAN

Para peneliti mengusulkan beberapa ide untuk membantu mengatasi masalah pengelolaan sampah di Desa Batukaras. *Pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya pengelolaan sampah. Upaya ini dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, yang dianggap sebagai langkah kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Jika pengelolaan sampah sudah terintegrasi dengan baik sejak tingkat rumah tangga, maka masalah sampah yang terkait dengan keterbatasan lahan TPS dapat teratasi dengan sendirinya. Peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui sosialisasi yang rutin dan berkala di sekolah-sekolah di Desa Batukaras. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Ibu PKK juga perlu ditingkatkan frekuensinya agar efektivitasnya semakin meningkat. Sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk ajakan untuk bergabung dalam Bank Sampah BENGRAS yang ada di Desa Batukaras, pembedaan terkait jenis-jenis sampah, dan juga pendidikan terkait 3R atau *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). *Kedua*, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran para wisatawan akan pentingnya pengelolaan sampah saat berkunjung ke Desa Batukaras. Wisatawan perlu menyadari bahwa kehadiran mereka bukan untuk meninggalkan sampah, melainkan untuk menikmati keindahan pantai yang tersedia. Oleh karena itu, wisatawan bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan selama kunjungan mereka. Pihak pengelola perlu melakukan sosialisasi ini kepada para wisatawan pada saat pembelian tiket untuk bertanggung jawab dengan sampahnya. Caranya adalah dengan memberikan tempat sampah plastik yang wajib dibawa kembali beserta dengan sampah-sampah wisatawan pada saat akan meninggalkan Desa Batukaras.

*Ketiga*, pihak Desa dan juga Dinas Pariwisata perlu untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas

terkait pengelolaan sampah ini, seperti tempat sampah di tempat-tempat wisata dan juga plang-plang himbauan untuk bertanggung jawab akan sampah yang dihasilkan oleh para wisatawan. Keberadaan fasilitas yang memadai akan membuat wisatawan maupun masyarakat Desa Batukaras semakin tergerak dalam mengelola sampah. Terkait fasilitas tempat sampah juga, pihak Desa maupun Dinas Pariwisata kiranya perlu menyediakan tempat sampah di sepanjang jalan menuju tempat wisata Legok Pari. Sebab, sejauh pengamatan peneliti, tempat sampah di sepanjang jalan tersebut sangat terbatas. Keempat, pihak Desa perlu juga untuk membuat aturan terkait tata kelola sampah di Desa Batukaras. Peneliti juga melihat fakta bahwa Desa Batukaras belum memiliki Peraturan Desa (PERDES) atau turunan dari PERDA No. 10 Tahun 2016 Kabupaten Pangandaran terkait tata kelola sampah. Peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata benar-benar memperhatikan pengelolaan sampah dalam setiap kegiatan mereka. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial bagi mereka yang tidak mematuhi standar pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

## REFERENSI

Arimbawa, W., & Putra, I. K. A. 2021. Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme: Diskursus Pengelolaan Lingkungan dan Tata Ruang Bali. *Jurnal Ecocentrism*, 1(2). <https://doi.org/10.36733/jeco.v1i2.2423>

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). Pantai Batu Karas. Badan Penghubung Jawa Barat. <https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/pantai-batu-karas/>

Brown, L. R., & Worldwatch Institute. 1981. *Building a Sustainable Society*. Norton.  
Dummett, C., Hagens, C., & Morel, D. 2013. *Guidance on Participatory Assessments*. Catholic Relief Services.

Fakih, M. 2002. *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

JADESTA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. (n.d.). Desa Wisata Batukaras. JADESTA. <https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/batukaras>  
KEMENPAREKRAF. (n.d.). Desa Wisata Batukaras. JADESTA. <https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/batukaras>

Kementerian Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Desa Wisata (II ed.)*. Kementerian Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Kurniawan, A. R., & Primawardani, Y. 2021. Dampak Bisnis Pariwisata terhadap Masyarakat Lokal: Studi Dampak Bisnis Pariwisata terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 116-126.

Latif, B. S. (2019). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PESISIR: Studi pada Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(62), 7252-7253.

Madiani. (2016, February 18). DPRD Pangandaran Soroti Masalah Sampah di Batukaras. *Harapan Rakyat*. <https://www.harapanrakyat.com/2016/02/dprd-pangandaran-soroti-masalah-sampah-di-batukaras/>

Maharani, S. D. 2016. Manusia sebagai Homo Economicus: Refleksi atas Kasus-kasus Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1). <https://doi.org/10.22146/jf.12624>

Millah, R. S., & Fadlina, S. 2023. ANALISIS DAYA DUKUNG (CARRYING CAPACITY) DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PANTAI BATU KARAS KABUPATEN PANGANDARAN.

Tourism Scientific Journal, 8(2), 191-213. 10.32659/tsj.v8i2.268

Muthmainnah, L. 2008. Tinjauan Filosofis Problema Pengelolaan Sampah. *Jurnal Filsafat*, 18(1).

Nuryaman, Y. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4).

Nuryaman, Y. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4).

Pohan, Y. F., & Suprihardjo, R. 2013. Pengelolaan Sampah Perumahan Kawasan Pedesaan Berdasarkan Karakteristik Timbulan Sampah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Teknis ITS*, 2(1). 10.12962/j23373539.v2i1.2468

Pohan, Y. F., & Supriharjo, R. D. 2013. Pengelolaan Sampah Perumahan Kawasan Pedesaan Berdasarkan Karakteristik Timbulan Sampah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Teknik Pomits*, 2, 6.

Rahmi, H. S. (2014, July 7). Asal Usul “Bancakan” Dan “Botram” | Dunia Aleut! Komunitas Aleut. <https://komunitasaleut.com/2014/07/07/asal-usul-bancakan- dan-botram/>